

## **BAB III**

### **ANALISIS *SECURITY CONCEPT* DALAM STRATEGI TIONGKOK TERHADAP TAIWAN**

Dalam bab III ini akan membahas terkait *Security Concept*, yang di mana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Tiongkok merasa adanya ancaman bagi negaranya, ancaman tersebut telah di analisis pada sektor dalam keamanan Barry Buzan. Pada bab sebelumnya, sudah ditentukan bahwa akan membahas 3 sektor dalam keamanan, sehingga dalam pembahasan ini akan fokus pada 3 sektor keamanan tersebut yaitu: *Military sector*, *Political sector* dan *Economic sector*. Dalam pembahasan ini terdapat korelasi antara bab II, yaitu dengan adanya sebuah ancaman kemudian negara mengambil sikap dengan membuat strategi untuk menjaga keamanan Tiongkok. Di dalam penulisan ini akan dibagi menjadi empat sub bab, yaitu: *Pertama*, strategi *Military Sector* Tiongkok terhadap Taiwan. *Kedua*, strategi *Political Sector* Tiongkok terhadap Taiwan. *Ketiga*, strategi *Economic Sector* Tiongkok terhadap Taiwan. *Keempat*, Tinjauan *Security Concept* Tiongkok terhadap Taiwan.

#### **3.1 STRATEGI *MILITARY SECTOR* TIONGKOK TERHADAP TAIWAN**

Pada sektor militer, menurut Barry Buzan dalam buku *Security: A New Framework for Analysis*, negara merupakan hal yang paling penting, namun bukan satu-satunya objek dalam keamanan militer. Negara-negara pada umumnya memiliki sumber daya militer yang jauh lebih besar daripada aktor-aktor lain. Pemerintah didefinisikan sebagai pemegang kekuasaan militer, yang mana pemerintah memiliki kepentingan tersendiri sehingga ingin mempertahankan kekuasaan mereka. Dalam tindakannya, agenda keamanan militer berfokus pada kemampuan pemerintah untuk mempertahankan diri terhadap ancaman militer internal dan eksternal. Untuk mempertahankan diri dari ancaman militer, negara dapat menggunakan kekuatan militer untuk membela negara (Barry Buzan, 1998, hal. 49-50).

Dalam keamanan militer, apabila negara merasa adanya ancaman militer yang bersifat internal, maka keamanan militer sehubungan dengan kemampuan negara untuk mempertahankan perdamaian sipil dan integrasi teritorial. Ketika negara merasa adanya ancaman eksternal, keamanan militer sehubungan dengan interaksi kemampuan tingkat persenjataan secara ofensif dan defensif (Barry Buzan, 1998, hal. 51).

Sesuai dengan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, mengenai ancaman apabila Taiwan dapat melepaskan diri dari Tiongkok. Terdapat adanya hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan yang termasuk dalam ancaman militer. Karena, Taiwan memiliki hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat dengan adanya pasokan senjata dari Amerika Serikat. Tujuannya, untuk memperkuat militer Taiwan. Sehingga, Tiongkok memiliki kebijakan militer untuk tetap menjadikan Taiwan tetap menjadi bagian dari Tiongkok (Albert, 2016).

Tiongkok mempunyai prinsip tidak akan menyerang apabila tidak diserang terlebih dahulu. Namun untuk Taiwan walaupun Tiongkok mengutamakan pendekatan damai dengan Taiwan. Tiongkok tidak akan segan untuk menggunakan berbagai kebijakan untuk menyerang Taiwan apabila Taiwan tetap bersikeras untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Tentunya, Tiongkok telah membuat kebijakan terhadap Taiwan untuk menjaga keamanan wilayah Tiongkok (Prasetya, 2014, hal. 55).

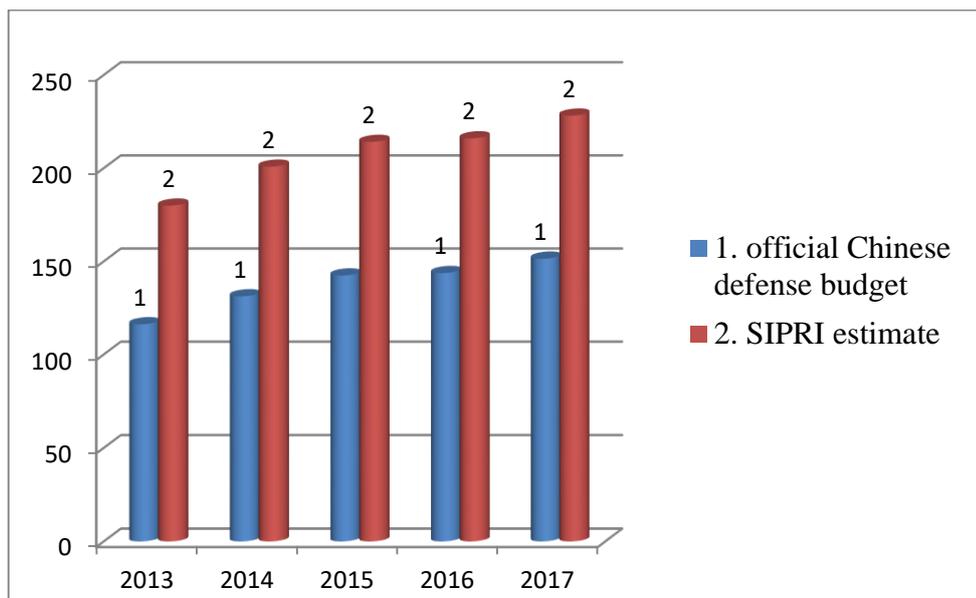
Tugas strategis dari gerakan modernisasi Tiongkok dalam menjamin keamanan serta perdamaian adalah membangun pertahanan nasional yang kuat. Kebijakan militer merupakan salah satu dari bagian strategi keamanan untuk menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah Tiongkok dengan menggunakan persenjataan yang kuat. Tiongkok merupakan negara berkembang yang besar dan masih menghadapi berbagai masalah ancaman keamanan. Untuk mewujudkan tujuan keamanan Tiongkok, angkatan bersenjata Tiongkok akan bekerja lebih keras dan menekankan pada penggunaan kekuatan militer. Angkatan bersenjata Tiongkok akan menjaga kedaulatan Tiongkok, kepentingan keamanan dan pembangunan

sesuai yang tertera pada buku putih tentang strategi militer Tiongkok pada tahun 2015 (White Paper, 2015).

Dalam buku putih tersebut Angkatan bersenjata Tiongkok akan mengemban tugas menangani adanya ancaman militer dan secara efektif untuk menjaga kedaulatan dan keamanan teritorial Tiongkok, untuk menjaga keamanan kepentingan luar dan dalam negeri Tiongkok, untuk mempertahankan pencegahan strategis dan melakukan serangan balik apabila diserang, serta menjaga perdamaian regional dunia (White Paper, 2015).

Presiden Xi Jinping bersikeras untuk membangun militer Tiongkok untuk dapat mencapai militer yang berkelas dunia pada tahun 2050. Untuk dapat mencapai militer yang berkelas dunia tersebut Tiongkok akan menyelesaikan modernisasi militernya pada tahun 2035. Xi bertekad untuk mempercepat penerapan proyek, memperdalam ilmu pertahanan, teknologi dan industri, dan membangun strategi integrasi nasional (Samosir, 2017 ).

**Grafik 3.1: Pengeluaran Belanja Militer Tiongkok 2013-2017**  
(USD Billion)



Sumber: (CSIS, 2018)

Data di atas menunjukkan sejak tahun 2013 sejak Xi Jinping menjabat, terdapat ambisius untuk mendorong adanya modernisasi militer dalam meningkatkan kekuatan militer Tiongkok. Hal tersebut dapat terlihat pada data di atas bahwa terdapat belanja militer dari tahun 2013 hingga 2017 yang mengalami kenaikan.

*People's Liberation Army (PLA)* Tiongkok sedang meningkatkan tindakan militer untuk melawan Taiwan. Terdapat kemungkinan bahwa Tiongkok akan menggunakan pendekatan dengan menggunakan pemberian isyarat kepada Taiwan untuk mempersiapkan kesiapannya bahwa Tiongkok akan menggunakan kekerasan yang mana PLA telah memperkuat kekuatannya untuk mengoptimalkan militer.

*Pertama, Maritime Blockade.* Blokade adalah pengepungan atau penutupan suatu kawasan atau tempat sehingga barang atau kapal tidak bisa keluar dan masuk secara bebas. Blokade yang dilakukan oleh PLA di Taiwan dilakukan untuk mengancam kapal laut masuk atau keluar dari pelabuhan Taiwan (Departement of Defense, 2017, hal. 76).

*Kedua, Limited Force or Coercive Options.* Yang mana, Tiongkok tidak segan menggunakan operasi informasi, operasi pasukan khusus di Taiwan, hukum atau aksi militer seperti serangan udara dalam melawan Taiwan, ancaman ekonomi dan politik. Hal tersebut dilakukan agar menurunkan kepercayaan penduduk Taiwan pada pemimpin mereka. Pasukan khusus PLA dapat menginflasi Taiwan dan melakukan serangan untuk Taiwan dengan cara menyerang infrastruktur dan kepemimpinan (Departement of Defense, 2017, hal. 76).

*Ketiga, Air and Missile Campaign.* Yang dimaksudkan adalah Tiongkok akan menggunakan serangan rudal dan serangan udara terhadap sistem pertahanan udara, termasuk dalam radar, situs, dan fasilitas komunikasi untuk menurunkan pertahanan nasional Taiwan, menggagalkan kepemimpinan Taiwan serta melemahkan tekad masyarakat Taiwan (Departement of Defense, 2017, hal. 76).

*Keempat, Amphibious Invasion.* Militer Tiongkok telah memperluas kemampuannya untuk melakukan serangan amfibi di pulau Taiwan. Yang dilakukan Tiongkok ialah melakukan kampanye pendaratan pulau bersama dan mengembangkan angkatan darat, laut dan udara untuk memperkuat koordinasi (Departement of Defense, 2017, hal. 76). Hal tersebut bertujuan untuk dapat menerobos pertahanan pantai, membangun tempat untuk transportasi peralatan atau persenjataan yang berada di utara atau selatan pantai Taiwan (Gershaneck, 2015).

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa terdapat empat strategi militer tersebut merupakan salah satu usaha Tiongkok dalam mengatasi ancaman posisi Taiwan bagi Tiongkok. Tujuan dari empat strategi adalah untuk menjadikan Taiwan tetap menjadi bagian dari negaranya. Tidak hanya itu, Tiongkok juga memiliki strategi politik dan strategi ekonomi untuk mengatasi ancaman posisi Taiwan bagi Tiongkok. Sehingga, Subbab berikut akan menjelaskan kebijakan strategi politik terlebih dahulu.

### **3.2 STRATEGI *POLITICAL SECTOR* TIONGKOK TERHADAP TAIWAN**

Keamanan sektor politik biasanya tentang stabilitas organisasi dari tatanan sosial. Sektor politik merupakan sektor terluas sehingga semua ancaman dan pertahanan dapat didasari dan didefinisikan secara politis. Keamanan politik dapat didefinisikan dengan dua arah. Pertama, keamanan politik dapat termasuk pada ancaman non-militer dalam unit-unit politik. Kedua, keamanan politik juga dapat termasuk dalam masyarakat internasional atau hukum internasional. Dalam sektor politik, karakteristik keamanan politik biasanya akan menjadi karakteristik umum keamanan, karena semua keamanan bersifat politis. Sehingga, untuk menentukan keamanan politik sulit untuk dibatasi, karena berkaitan dengan keamanan sosial, lingkungan, dan militer (Barry Buzan, 1998, hal. 141).

Dalam keamanan politik yang dimaksud dalam ancaman politik yaitu ancaman yang murni politik, sehingga ancaman tidak dipengaruhi oleh sektor militer, ekonomi, lingkungan atau sektor lain (Barry Buzan, 1998, hal. 142).

Ancaman politik dibuat untuk internal unit politik yang berkaitan dengan ideologi dan gagasan konstitutif lainnya dan isu-isu yang mendefinisikan negara (Barry Buzan, 1998, hal. 144) Hal ini, telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai ancaman sektor politik. Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman politik tersebut Tiongkok menggunakan kebijakan politik untuk membuat Taiwan tetap menjadi bagian dari negaranya.

Sejak tahun 1940-an perpolitikan antara Tiongkok dan Taiwan telah lama bersaing. Kedua negara tersebut telah mempunyai pemerintahan sendiri, namun Tiongkok tetap mengklaim kedaulatan atas Taiwan untuk tetap menjadi bagian dari Tiongkok sementara Taiwan ingin melepaskan diri dari Tiongkok (VOA Indonesia, 2016). Sehingga, Tiongkok membuat kebijakan politik yang diberikan untuk Taiwan. Pembuatan kebijakan yang paling penting bagi Tiongkok adalah membawa Taiwan kembali ke wilayahnya. Partai Komunis Tiongkok telah membuat strategi politik yang dilakukan terhadap Taiwan, yaitu *A United Front*, *Interference in Taiwan Politics*, dan *Isolated and Alone*.

*Pertama, A United Front.* Yang mana dalam kebijakan tersebut berusaha untuk memperlakukan masyarakat Taiwan sebagai orang Tionghoa (Yung, 2017). Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi masyarakat Taiwan yang menyebut dirinya sebagai 'Taiwan' bukan 'Tionghoa' dan menginginkan pemerintah Taiwan yang mengakui *Republic of China* (ROC) menjadi secara resmi menerima *People's Republic of China* (PRC). (Groot, 2015, hal. 171). *Kedua, Interference in Taiwan Politics.* Tiongkok lebih mengakui Partai Nasionalis (KMT) daripada Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan (Yung, 2017).

Hal ini disebabkan karena KMT mengakui bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayah Tiongkok dan Tiongkok merupakan pemerintahan yang sah. Sedangkan DPP lebih

memihak Taiwan untuk merdeka. Oleh karena itu, KMT menggunakan strategi politik ini untuk melawan Taiwan dengan cara campur tangan dalam urusan politik internal di Taiwan dan mempertanyakan kemampuan DPP dalam mengatur Taiwan karena perekonomian Taiwan menurun. Akibatnya masyarakat Taiwan tanpa henti dibombardir dengan adanya propaganda melalui media sosial, yang menunjukkan bahwa pemerintahan di bawah DPP perekonomian Taiwan akan menurun (Lin, 2016, hal. 8-9).

*Ketiga, Isolated and Alone.* Dalam strategi ini Tiongkok mengupayakan untuk menghilangkan Taiwan dalam pengakuan resmi dalam forum internasional dan menghalangi penjualan senjata yang diperuntukkan untuk Taiwan (Yung, 2017). Untuk menghilangkan Taiwan dalam Forum Internasional yang dilakukan Tiongkok adalah Taiwan diblokir dalam partisipasinya dalam organisasi kesehatan dunia atau WHO, Tiongkok mendorong agar Taiwan diblokir karena pemerintahan Tsai menolak mengakui adanya konsensus 1992 (Wees, 2017).

Di atas telah dijelaskan bahwa terdapat tiga strategi politik yang digunakan oleh Tiongkok untuk tetap menjadikan Taiwan tetap menjadi bagian dari negaranya. Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa selain strategi militer terdapat strategi politik dan ekonomi. Pada subbab ini telah dijelaskan mengenai strategi politik. Pada subbab selanjutnya akan dijelaskan mengenai kebijakan dan strategi ekonomi Tiongkok untuk mengatasi ancaman posisi Taiwan bagi Tiongkok

### **3.3 STRATEGI *ECONOMIC SECTOR* TIONGKOK TERHADAP TAIWAN**

Sektor ekonomi memiliki banyak objek referensi yaitu individu, subsistem hingga negara. Gagasan keamanan ekonomi terletak dalam debat-debat ekonomi politik mengenai struktur politik dan struktur ekonomi pasar. Sehingga, adanya perbedaan pandangan mengenai hal tersebut, Pada kaum liberal, ekonomi dijadikan akar dari tatanan sosial dan

pasar dioperasikan tanpa campur tangan negara. Kaum sosialis berpendapat bahwa ekonomi bertujuan untuk terciptanya keadilan dan kesetaraan sosial (Barry Buzan, 1998, hal. 95).

Terdapat beragam isu-isu spesifik yang termasuk dalam keamanan ekonomi seperti: kemampuan negara-negara untuk mempertahankan produksi militer di pasar global atau kemampuan untuk mobilisasi militer negara, kekhawatiran mengenai perdagangan ilegal, kekhawatiran mengenai pasar global apabila menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan (Barry Buzan, 1998, hal. 98).

Dalam sektor ekonomi juga dibahas mengenai ancaman keamanan ekonomi yang dapat berpengaruh pada stabilitas domestik, hal ini dapat terjadi ketika suatu negara mengejar kebutuhan ekonomi berdasarkan kesejahteraan negara tersebut. Sesuai dengan apa yang dijelaskan pada bab sebelumnya, mengenai ancaman pada sektor ekonomi. Sehingga, Tiongkok berusaha untuk mengatasi ancaman ekonomi tersebut dengan menggunakan kebijakan ekonomi (Barry Buzan, 1998, hal. 105).

Kebijakan ekonomi merupakan salah satu hasil dari proses pembuatan kebijakan, yang mana adanya kebijakan tersebut mempengaruhi perkembangan ekonomi untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi dan politik. Pembuatan kebijakan penting adanya untuk menentukan hasil kebijakan dan kinerja ekonomi. Seperti yang telah dilakukan oleh Tiongkok, pembuatan kebijakan ekonomi Tiongkok berdasarkan kepentingan ekonomi Tiongkok yang tumbuh secara global (Zhang, 2017, hal. 3).

Perekonomian Tiongkok berkembang sangat pesat yang bergantung pada tatanan internasional dan menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara yang mempunyai hubungan komersial dan keuangan yang erat dengan Tiongkok. Taiwan merupakan salah satu masalah yang sensitif di Tiongkok. Tiongkok menggunakan kekuatannya untuk membuat Taiwan tetap berada di bawah pemerintahannya.

Pertumbuhan ekonomi di Tiongkok yang semakin tinggi membuat ekonomi Tiongkok jauh melampaui Taiwan (Qomara, 2015, hal. 32).

Pada tahun 2010 terdapat perjanjian kerja sama ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan yang di mana dalam kerja sama tersebut menunjukkan terdapat kepentingan ekonomi satu sama lain. Tiongkok merupakan salah satu investor asing utama di Taiwan, adanya perjanjian kerja sama ekonomi tersebut membuat Taiwan lebih banyak menerima investasi Tiongkok. Kepentingan Tiongkok dalam berinvestasi di Taiwan didorong oleh kebutuhan untuk memperoleh manajemen dan teknologi, karena Taiwan telah mengembangkan sektor manajemen bisnis yang inovatif. Namun sekarang pasar Taiwan tertutup bagi investor Tiongkok dan tidak semua sektor terbuka untuk investasi Tiongkok (BBC, 2012).

Tiongkok berharap terdapat keterlibatan Taiwan di Tiongkok, sehingga Taiwan dan Tiongkok dapat saling berhubungan satu sama lain dengan membina hubungan ekonomi daripada kepentingan politik. Namun, sepertinya kepentingan politik dan ekonomi saling terkait sehingga berpengaruh dalam hubungan perekonomian. Dalam permasalahan yang terjadi antara Tiongkok dan Taiwan, Tiongkok tentunya memiliki strategi ekonomi untuk melakukan pendekatan dengan Taiwan (Tanner, 2007, hal. 3-4).

Tiongkok menggunakan unsur-unsur tekanan ekonomi seperti: *Pertama*, mengurangi jumlah wisatawan yang mengunjungi Taiwan. Pengurangan jumlah wisatawan yang mengunjungi Taiwan ini membuat penurunan kedatangan wisatawan dari Tiongkok ke Taiwan (Embrace, 2015, hal. 32). *Kedua*, Tiongkok berusaha meyakinkan Taiwan bahwa perekonomian Taiwan tidak akan maju apabila tidak adanya kerja sama ekonomi yang dilakukan dengan Tiongkok. (Hidriyah, 2016, hal. 7). *Ketiga*, mempermudah masyarakat Taiwan untuk bekerja di Tiongkok (Schubert, 2018).

Di atas telah dijelaskan strategi ekonomi Tiongkok untuk menjadikan Taiwan tetap menjadi negaranya. Pada subbab-subbab sebelumnya juga telah dijelaskan strategi militer dan

strategi politik Tiongkok. Untuk itu untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan mengenai keterkaitan *Security Concept* dan ancaman posisi Taiwan bagi Tiongkok dengan strategi keamanan Tiongkok untuk mengatasi ancaman Taiwan yang telah dipaparkan pada subbab-subbab di atas.

### **3.4 TINJAUAN SECURITY CONCEPT TIONGKOK TERHADAP TAIWAN**

Dari melihat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok untuk mempertahankan Taiwan untuk tetap menjadi bagian dari Tiongkok sepertinya ada yang berhasil dan ada pula yang tidak. Pada subbab ini akan dijelaskan strategi Tiongkok untuk mengatasi ancaman yang telah di bahas pada bab II.

*Pertama*, pada *Military Sector*. Terdapat ancaman yang dirasakan Tiongkok saat Amerika Serikat memiliki hubungan dengan Taiwan. Amerika Serikat terus menjual senjata terhadap Taiwan di bawah undang-undang hubungan antara Amerika Serikat dan Taiwan. Bahkan, tidak hanya persenjataan namun Amerika Serikat juga menjual kapal selam ke Taiwan (CNN Indonesia, 2018).

Sehingga, Tiongkok telah mengupayakan banyak hal yaitu *Maritime Blockade*, *Limited Force or Coercive Options*, *Air and Missile Campaign*, *Amphibious Invasion*. Hal tersebut merupakan suatu sikap Tiongkok dalam mengatasi ancaman militer yang dilakukan oleh Taiwan dengan cara memperkuat militernya agar Taiwan tetap menjadi bagian dari Tiongkok. Keempat strategi tersebut sesuai dengan keamanan pada sektor militer menurut Barry Buzan bahwa agenda keamanan militer berfokus pada kemampuan pemerintah untuk mempertahankan diri terhadap ancaman militer internal atau eksternal (Barry Buzan, 1998, hal. 49-50). Keempat strategi tersebut merupakan strategi dari PLA atau tentara Tiongkok, yang dibawah oleh pemerintah Tiongkok. Yang mana, pemerintah Tiongkok berusaha untuk mempertahankan Taiwan untuk tetap menjadi bagian dari negaranya (Departement of Defense, 2017).

Dalam *Maritime Blockade*. PLA akan terus berupaya mengumpulkan intelijen, pelatihan bersama dan memperbarui persenjataan yang modern dan canggih. *Blockade* di Taiwan ini PLA mengancam kapal yang keluar dan masuk dari pelabuhan Taiwan hal ini mudah dilakukan oleh Tiongkok, mengingat Tiongkok mempunyai armada kapal selam angkatan laut terbesar di Asia Timur. Apalagi, target *blockade* ini merupakan sebuah pulau yang mana kita tahu bahwa Taiwan merupakan sebuah pulau 'Kecil' yang pulau tersebut terputus dari akses luar kecuali dari udara dan laut. Sehingga, *blockade* ini dapat dikatakan dapat berhasil karena dalam geografi posisi Taiwan menguntungkan Tiongkok dalam serangan *Blockade* (Fan, 2017 ).

Kedua, dalam *Limited Force or Coercive Options* dan *Amphibious Invasion*. Kedua strategi tersebut digunakan oleh Tiongkok apabila Taiwan terus berupaya untuk mendorong kemerdekaan dan Taiwan menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. Dalam kedua strategi tersebut terutama dalam *Amphibious Invasion*. PLA terus meningkatkan kapabilitas dan membangun pendaratan amfibi yang lebih besar termasuk dalam pendaratan type 071 dan helikopter type 075 (Cole, 2018 ). Tiongkok juga telah memiliki pesawat amfibi AG600 yang sudah diuji. Dengan adanya membangun pendaratan amfibi yang lebih besar itu tentunya akan dapat mengangkut banyak barang dan personel PLA.

Selanjutnya dalam *Air and Missile Campaign*. PLA tidak segan menggunakan serangan rudal, seperti yang kita ketahui bahwa Tiongkok telah menggelar latihan militer dan telah mengarahkan rudal-rudal balistik ke Taiwan. Tiongkok telah menyiapkan rudal DF-16 (Dongfeng 16) yang dapat menyerang Taiwan yang mana rudal-rudal Tiongkok tersebut berdaya jangkau antara 1.000 sampai 1.500 km. PLA juga telah melakukan modernisasi persenjataan dan perkuatan militernya (Kompas, 2017 ).

Dalam upaya-upaya keras yang dilakukan Tiongkok yang sudah dijelaskan diatas kepada Taiwan. Dengan adanya PLA berupaya keras dalam latihan militer, dan Tiongkok

terus-menerus meningkatkan kapabilitas militernya dengan membangun pendaratan amfibi yang lebih besar tentunya dapat dikatakan berhasil apabila Tiongkok terus berupaya untuk meningkatkan militernya dengan keras.

Ditambah lagi, Tiongkok mempunyai senjata yang lebih kuat daripada Taiwan, serta Tiongkok memiliki personel yang lebih banyak yaitu 0,18% dari penduduk Tiongkok atau jumlahnya sekitar 2 juta lebih. Serta terdapat modernisasi militer Tiongkok yang memiliki teknologi modern saat ini (CNN Indonesia, 2018). Dengan adanya kebijakan militer tersebut, dan memiliki personel yang lebih banyak serta persenjataan yang modern, Tiongkok tentunya akan dapat mengatasi ancaman militer tersebut. Hal itu, sesuai dalam keamanan pada sektor militer menurut Barry Buzan, yang mana untuk mempertahankan diri dari ancaman militer, negara dapat menggunakan kekuatan militer untuk membela negara (Barry Buzan, 1998, hal. 49-50).

Walaupun Taiwan berusaha keras untuk memperkuat militernya, Tiongkok juga akan meningkatkan militernya dengan lebih signifikan. Karena, Xi Jinping juga telah memerintahkan untuk adanya latihan militer dan modernisasi militer, kebijakan militer Tiongkok tersebut dirasa akan berhasil mengatasi ancaman tersebut karena kemampuan militer Tiongkok berada di posisi ketiga di bawah Amerika Serikat dan Rusia serta jumlah personel militer Tiongkok yang banyak (Fathun, 2016, hal. 194). Sesuai dengan tabel di bawah ini:

**Grafik 3.4.1: Peringkat Kekuatan Militer dan Jumlah Personil Tentara**

<b>Negara</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Jumlah Personil Tentara</b>
Amerika Serikat	1	1.281.900

Rusia	2	771.000
China	3	2.300.000
India	4	2.140.000
Prancis	5	203.000

Source: (Armed Forces, 2016)

*Kedua*, pada *Political Sector*. Terdapat kebijakan politik untuk menangani tiga ancaman posisi Taiwan, yaitu: usaha Taiwan untuk mendapatkan rekognisi sebagai negara berdaulat; Tiongkok tidak ingin Taiwan merdeka dan jatuh dalam kekuasaan negara lain; serta adanya demokrasi di Taiwan. Tiongkok mengeluarkan kebijakan politik untuk mengatasi ancaman tersebut yaitu dengan, *A United Front, Interference in Taiwan Politics* dan *Isolated and Alone*. Dari ketiga kebijakan politik tersebut, Tiongkok paling menekankan pada *Isolated and Alone* yaitu Tiongkok mengupayakan untuk menghilangkan Taiwan dalam pengakuan resmi dalam forum internasional.

Tsai terus berupaya untuk memperjuangkan kebebasan dan demokrasi Taiwan. Untuk membungkam ambisi Taiwan, Tiongkok menggunakan kekuatannya untuk dapat memutuskan hubungan resmi Taiwan dengan negara lain (Suastha, 2017). Xi Jinping memutuskan hubungan resmi antara Taiwan dengan negara lain dengan menegaskan adanya *One China Policy*, yang mana apabila negara lain ingin bekerja sama dengan Tiongkok maka tidak bekerja sama dengan Taiwan, sehingga negara lain harus menghormati dan mengakui kebijakan tersebut apabila ingin tetap bekerja sama dengan Tiongkok karena menurut Tiongkok Taiwan masih berada di bawah wilayah Tiongkok (Nabhila, 2017, hal. 16).

*One China Policy* tersebut merupakan sebuah pertahanan Tiongkok untuk menjadikan Taiwan tetap menjadi bagian dari negaranya. Hal ini sesuai dengan keamanan pada sektor

politik menurut Barry Buzan, yang makan dikatakan bahwa semua ancaman dan pertahanan dapat didasari secara politis sehingga termasuk dalam sektor politik (Barry Buzan, 1998, hal. 141).

Adanya *One China Policy* tersebut, membuat negara yang mengakui secara resmi bahwa Taiwan merupakan sebuah negara, maka Tiongkok menolak hubungan kerja sama dengan negara tersebut. Kurang lebih terdapat 19 negara mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, beberapa negara tersebut terdapat di Amerika Tengah (Myers, 2017). Penekanan yang dilakukan oleh Tiongkok secara terus-menerus dengan menekan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, akhirnya Taiwan terancam kehilangan dukungan diplomatiknya, seperti Taiwan telah kehilangan El Salvador, Guatemala dan Honduras (Perdana, 2018).

Taiwan mengakui bahwa posisinya semakin terpinggirkan dalam dunia internasional akibat upaya Tiongkok yang terus menghalangi Taiwan dalam mendapat pengakuan Internasional. Apabila Taiwan dapat pengakuan dari negara lain, maka dikhawatirkan akan mengurangi eksistensi Tiongkok pada negara lain. Karena, banyak negara yang ingin bekerja sama dengan Taiwan, terutama dalam bidang ekonomi namun terhambat atas *One China Policy* (Mahadeli, 2014, hal. 5).

Kebijakan politik yang ditekankan pada Taiwan dapat dikatakan berhasil karena, sampai saat ini pun Taiwan belum diakui sebagai sebuah negara oleh dunia Internasional termasuk PBB. Serta, Tiongkok menggunakan strategi *Interference in Taiwan Politics* untuk mencampuri urusan internal dalam permasalahan di Taiwan. Sehingga, Tiongkok selalu terlibat dalam permasalahan yang menyangkut pada Taiwan.

Dari ketiga strategi politik dan ancaman yang dirasakan Tiongkok pada posisi Taiwan, semuanya tidak ada menggunakan sarana militer, ekonomi, lingkungan maupun sarana yang lain. Sehingga hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Barry Buzan, bahwa Dalam

keamanan politik yang dimaksud dalam ancaman politik yaitu ancaman yang murni politik, sehingga ancaman tidak dipengaruhi oleh sektor militer, ekonomi, lingkungan atau sektor lain (Barry Buzan, 1998, hal. 142).

*Ketiga*, pada *Economic Sector*. Terdapat ancaman ekonomi apabila Taiwan dapat lepas dari Tiongkok, akan mengganggu hubungan kerja sama ekonomi antar kedua negara tersebut, karena Taiwan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, seperti pada perindustrian. Sehingga Tiongkok berusaha mengejar kebutuhan ekonomi tersebut untuk dapat menyejahterakan negaranya. Tiongkok memiliki strategi ekonomi untuk mengatasi hal tersebut agar Taiwan tetap menjadi bagian dari Tiongkok. Hal ini, sesuai dengan apa yang dikatakan Barry Buzan dalam keamanan pada sektor ekonomi bahwa suatu negara mengejar kebutuhan ekonomi untuk menyejahterakan negara tersebut (Barry Buzan, 1998, hal. 105). Strategi ekonomi Tiongkok yaitu:

*Pertama*, mengurangi jumlah wisatawan yang mengunjungi Taiwan. Pada tahun 2015 jumlah penerbangan langsung antara Tiongkok dan Taiwan mencapai 900 orang per-minggu. Dan terdapat lebih dari 9,4 juta orang yang melakukan penerbangan antara Tiongkok dan Taiwan pada tahun 2014. Namun, pada saat Tiongkok mengurangi jumlah wisatawan yang mengunjungi Taiwan, jumlah pengunjung ke Taiwan dari Tiongkok turun hingga 20 % dari 2016 ke 2017 (Albert, 2016).

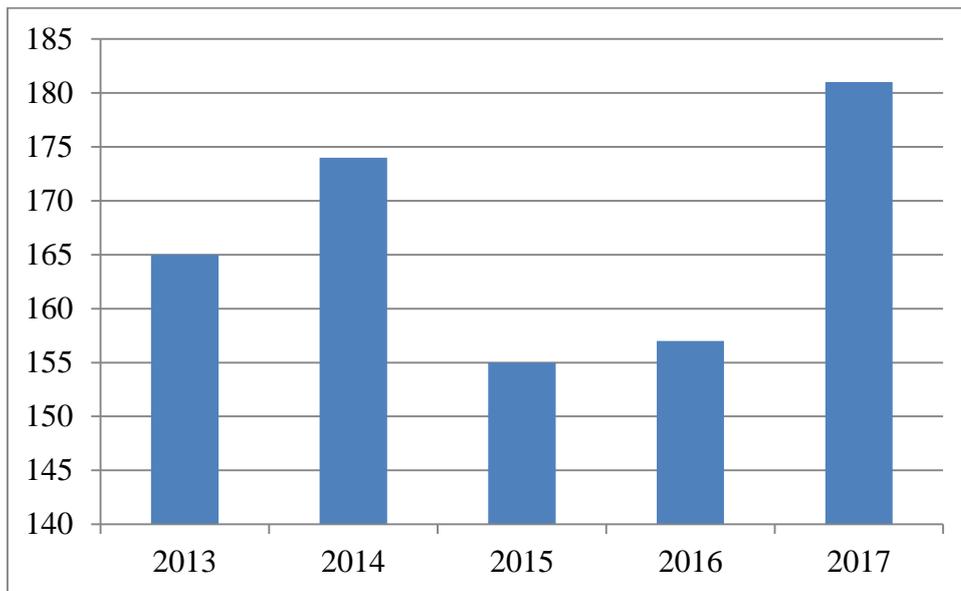
*Kedua*, Tiongkok berusaha meyakinkan Taiwan bahwa perekonomian Taiwan tidak akan maju apabila tidak adanya kerja sama ekonomi dengan Tiongkok. Tiongkok membuat Taiwan untuk bergantung pada perekonomian Tiongkok agar hubungan Tiongkok dan Taiwan semakin erat. Tentunya Tiongkok memiliki tujuan akan hal tersebut, untuk membuat Taiwan yakin ekonomi Taiwan tidak maju apabila tidak adanya kerja sama dengan Tiongkok. Walaupun Tiongkok dan Taiwan berkonflik, namun pada sektor ekonomi, khususnya dalam

bisnis dan investasi, Tiongkok dan Taiwan merupakan suatu mitra yang baik sejak tahun 2002, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar bagi Taiwan (Hidriyah, 2016, hal. 7).

*Ketiga*, mempermudah masyarakat Taiwan untuk bekerja di Tiongkok. *China Taiwan Affairs* mengumumkan bahwa terdapat 31 kebijakan preferensi baru yang dibuat oleh Tiongkok yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat Taiwan agar datang ke Tiongkok dengan cara memberikan perlakuan yang sama dengan masyarakat Tiongkok lainnya. Dari 31 kebijakan tersebut, 12 di antaranya berkaitan dengan fasilitas akses pasar dan persaingan perusahaan Taiwan yang berada di Tiongkok. Sementara itu, 19 kebijakan lainnya merupakan peluang baru bagi masyarakat Taiwan untuk dapat berpendidikan tinggi, mendirikan usaha baru atau dapat bergabung dengan tenaga kerja di Tiongkok. Contohnya seperti, masyarakat Taiwan dijanjikan untuk mendapatkan akses industri yang lebih baik, tenaga profesional dapat bekerja di Tiongkok dan tidak adanya pembatasan administratif. Hal tersebut merupakan upaya Tiongkok untuk menarik masyarakat Taiwan untuk berinvestasi dan berkarir serta tinggal di Tiongkok (Schubert, 2018).

Dari ketiga strategi tersebut ada yang berhasil ada juga yang belum berhasil. Yang berhasil, pada strategi Tiongkok mengurangi jumlah wisatawan yang mengunjungi Taiwan dan mempermudah masyarakat Taiwan untuk bekerja di Tiongkok. Dalam mengurangi jumlah wisatawan Tiongkok ke Taiwan, terlihat dari penurunan jumlah wisata di Taiwan tabel di bawah ini:

**Grafik 3.4.2: Pariwisata Taiwan (USD Billion)**



Source: (Albert, 2016)

Pada strategi yang belum berhasil pada strategi Tiongkok meyakinkan Taiwan bahwa perekonomian Taiwan tidak akan maju apabila tidak adanya kerja sama ekonomi dengan Tiongkok. Karena Taiwan bersikeras untuk tidak terlalu menggantungkan perekonomiannya kepada Tiongkok, karena Taiwan membutuhkan perubahan yang besar terhadap perekonomiannya (Tanasaldy, 2017, hal. 51).

Menurut Tsai Ing-wen, masa depan Taiwan bukan pada Tiongkok, namun pada dunia. Hal tersebut ditunjukkan dalam keberhasilan Taiwan dalam pembangunan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan ekonomi pada negara itu. Terlihat dari sisi pendapatan perkapita, tabungan domestik, dan devisa yang sangat besar, semua hal tersebut merupakan suatu peluang Taiwan untuk dapat meningkatkan perdagangan, memberi bantuan luar negeri atau menambah investasi luar negeri (Tanasaldy, 2017, hal. 52).

Untuk lebih jelasnya, adanya ancaman dan strategi Tiongkok untuk mengatasi ancaman tersebut yang berkaitan dengan *Security Concept*, digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4: Tinjauan Kebijakan Tiongkok pada Taiwan**

No	Sektor Keamanan <i>Security Concept</i>	Ancaman Posisi Taiwan bagi Tiongkok	Kebijakan Tiongkok
1.	<i>Military Sector</i>	Hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan; pasokan senjata dari Amerika Serikat	<i>Maritime Blockade, Limited Force or Coercive Options, Air and Missile Campaign</i>
2.	<i>Political Sector</i>	Usaha Taiwan untuk mendapatkan rekognisi sebagai negara berdaulat; berusaha berpartisipasi di PBB, Taiwan jatuh dalam kekuasaan negara lain; memiliki wilayah strategis, Demokrasi di Taiwan; ideologi berlawanan dengan Tiongkok	<i>Isolated and Alone, Interference in Taiwan Politics, A United Front</i>
3.	<i>Economic Sector</i>	Potensi ekonomi Taiwan cukup besar; memiliki sumber daya yang mumpuni	Pengurangan Jumlah Wisatawan, Meyakinkan Taiwan untuk bekerja sama dengan Tiongkok, Mempermudah masyarakat bekerja di Tiongkok

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa terdapat kebijakan Tiongkok untuk tetap menjadikan Taiwan tetap menjadi bagian dari Tiongkok. Dari tabel di atas juga dijelaskan bahwa: *Pertama*, pada *Military Sector*. Tiongkok mempunyai strategi *Maritime Blockade, Limited Force or Coercive Options*, dan *Air and Missile Campaign*. *Kedua*, pada *Political Sector*. Tiongkok mempunyai strategi *A United Front*, *Interference in Taiwan Politics* dan *Isolated and Alone*. *Ketiga*, pada *Economic Sector*. Terdapat strategi

pengurangan Jumlah Wisatawan, meyakinkan Taiwan untuk bekerja sama dengan Tiongkok, dan mempermudah masyarakat bekerja di Tiongkok.

Strategi-strategi tersebut untuk mengatasi ancaman posisi Taiwan bagi Tiongkok yang telah dijelaskan pada bab II. Yang mana terdapat ancaman yang dirasakan Tiongkok terkait posisi Taiwan. *Pertama*, pada *Military Sector*: adanya hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan dalam pasokan senjata. Kedua, pada *Political Sector*. Terdapat tiga ancaman yaitu: usaha Taiwan untuk mendapatkan rekognisi sebagai negara berdaulat; Taiwan jatuh dalam kekuasaan negara lain dan demokrasi di Taiwan. *Ketiga*, pada *Economic Sector*: adanya Potensi ekonomi Taiwan cukup besar.

Dalam strategi Tiongkok untuk tetap menjadikan Taiwan tetap menjadikan Taiwan tetap menjadi bagian dari negaranya. Pada strategi *Military Sector* dan *Political Sector* untuk mengatasi ancaman posisi Taiwan kemungkinan akan berhasil untuk membuat Taiwan tetap menjadi bagian dari Tiongkok. Sedangkan, pada strategi *Economic Sector*, ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil karena sampai saat ini Taiwan masih berusaha keras agar perekonomian negaranya tidak bergantung pada Tiongkok.

Pembahasan skripsi ini ditekankan pada *Non-Traditional Security* dalam buku Barry Buzan yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis*. Pada buku tersebut menjelaskan bahwa terdapat lima sektor keamanan yaitu: *Military Sector*, *Environmental Sector*, *Economic Sector*, *Societal Sector*, dan *Political Sector*. Namun, pada Skripsi ini hanya menjelaskan pada *Military Sector*, *Economic Sector* dan *Political Sector* saja. Sehingga, penelitian dalam skripsi ini dapat berbeda dengan hasil penelitian yang lain apabila peneliti mengkaji menggunakan variabel yang lain.

